

SKRIPSI

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-
1(S1) Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Riau*



Oleh:

RINI RAMADHANI

175310759

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis *value for money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berdasarkan pada tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian yang dilakukan menggambarkan tentang analisis data yang diterima dari Dinas Sosial kota Pekanbaru berupa data-data seperti jumlah anggaran, realisasi anggaran sehingga capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis data yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial kota Pekanbaru tahun 2019 dan 2020 belum memenuhi prinsip *value for money*. pada tahun 2019, ada 9 program dan 28 kegiatan yang terealisasi terdapat 26 kegiatan bersifat ekonomi ada 26 kegiatan bersifat efisien, 27 kegiatan bersifat efektivitas ada 29 kegiatan. Pada tahun 2020 terdapat 10 program dan 34 kegiatan yang tereliasasi 25 kegiatan terdapat 24 kegiatan yang bersifat ekonomisdan 26 kegiatan bersifat efisiensi bersifat efektivitas 20 kegiatan.

Oleh karena itu, diharapkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan dapat mengevaluasi program kinerja yang dijalankan agar dapat memperbaiki kinerja dan dapat memenuhi elemen *value for money*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang mendukung berdasarkan analisis yang dilakukan.

Kata kunci : *value for money*, ekonomi, efisiensi, efektif

ABSTRACT

This study aims to determine how the application of value for money analysis in the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) Pekanbaru City Social Service based on the level of economy, efficiency, and effectiveness. This type of research is descriptive qualitative research because the research conducted describes the analysis of data obtained from the Pekanbaru City Social Service in the form of data such as the amount of the budget, budget realization so that the performance achievements that have been carried out by the Pekanbaru City Social Service so as to provide a clear enough picture for The writer analyzed the data by using interview and documentation methods. The data used are primary data and secondary data.

The results show that accountability in the Performance Accountability Report of the Pekanbaru City Social Service Agency in 2019 and 2020 has not met the value for money principle. effectiveness there are 29 activities. In 2020 there were 10 programs and 34 activities, 25 activities were realized, there were 24 economic activities and 26 efficiency activities with 20 effectiveness activities.

Therefore, the Pekanbaru City Social Service is expected to be able to evaluate the performance programs carried out in order to improve performance and meet the value for money element. The results of this study are expected to provide supporting input based on the analysis carried out.

Keyword : Value for money economic, efficiency, effective

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas izin dan kemudahan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru”.

Penulis skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, maupun motivasi serta doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI. Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM, CRBC. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
3. Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Jurusan akuntansi

5. Bapak Dr.H.Zulhelmy,S.E.,M.Si,AK,CA,ACPA. Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan Bapak/Ibu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak memberkahi ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan KaryawatiTata Usaha fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
8. Terkhususnya untuk kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Syahrial dan Ibu Heri Suprianti. Tidak ada kalimat yang bisa menggambarkan rasa terima kasih ku kepada kalian yang telah memberikan doa terbaik kepada anak-anaknya.
9. Seluruh teman-teman Akuntansi Lokal E angkatan 2017 yang telah menjadi semangat.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan skripsi dimasa mendatang. Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Penulis

RINI RAMADHANI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Abstrak	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Kinerja	17
2.2. Pengukuran Kinerja	18
2.3. Tujuan Sistem pengukuran Kinerja	19
2.4. Manfaat Pengukuran Kinerja	20
2.5. Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja Keuangan	22
2.6. factor penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja	24
2.7. Karakteristik Indikator Kinerja	25
2.8. Manfaat Indikator kinerja	28
2.9. Peran Indikator Kinerja Bagi Pemerintah	28
2.10. Kinerja Keuangan	29
2.11. Pengukuran Kinerja Keuangan	30
2.12. Realisasi anggaran	31
2.13. Laporan Realisasi Anggaran	31
2.14. Value for money	33
2.14.1. Pengertian value for money	33
2.14.2. Gambaran Skematis	35
2.15. Indikator Value for money	37
2.16. Manfaat Implementasi Value for Money	38
2.17. Pengukuran Kinerja Value for money	39
2.17.1. Rasio Ekonomi	40
2.17.2. Rasio Efisiensi	40
2.17.3. Rasio Efektivitas	41
2.18. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	42
2.19. Laporan Akuntabilitas kinerja Sektor Publik	43
2.20. Penelitian Terdahulu	44
2.21. Kerangka Pemikiran	48
2.22. Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Objek Penelitian	49
3.2. Lokasi Objek Penelitian	49

3.3. Definisi variabel Penelitian.....	49
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data	53
3.6. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
4.2. Analisis Value For Money	
4.3. Pembahasan	110
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	133
5.2. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran	5
Tabel 1.2 Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2019.....	66
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2020.....	69
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Ekonomis Dinas Tahun 2019.....	73
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Ekonomis Dinas Tahun 2020.....	79
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Efisiensi Dinas Tahun 2019.....	86
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efisiensi Dinas Tahun 2020.....	92
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Dinas Tahun 2019.....	98
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Dinas Tahun 2020.....	104
Tabel 4.9 pembahasan perhitungan ekonomis Tahun 2019.....	116
Tabel 4.10 Pembahasan Perhitungan Ekonomis Tahun 2020.....	118
Tabel 4.11 Pembahasan Perhitungan Efisiensi Tahun 2019.....	120
Tabel 4.12 Pembahasan Perhitungan Efisiensi Tahun 2020.....	122
Tabel 4.13 Pembahasan Perhitungan Efektif Tahun 2019.....	124
Tabel 4.14 Pembahasan Perhitungan Efektif Tahun 2020.....	126

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas 57



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah harus menerapkan sistem akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Sebagai sistem akuntabilitas publik atas penggunaan dana keuangan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna informasi keuangan tentang situasi keuangan dan semua transaksi yang dikirim secara berkala oleh pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan topik yang sangat penting dan harus dipelajari dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Semua pemerintah harus mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik, Pemerintah pusat dan daerah, satuan kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara, serta organisasi sektor publik lainnya, memiliki tuntutan akuntabilitas yang semakin meningkat. Laporan keuangan perlu dipublikasikan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi publik, karena merupakan informasi bagi publik, serta memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan organisasi dan perilaku tata kelola yang baik seperti sebagai pemerintahan yang bersih dan baik untuk mewujudkan tata kelola data, ekonomi, transparansi, daya tanggap dan

akuntabilitas para penanggung jawab. Mereka membutuhkan instansi pemerintah, khususnya sektor publik di Indonesia, untuk transparan tentang pelaporan keuangan, dan akuntabilitas publik adalah salah satu alat untuk mendorong pelaporan keuangan.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk itu diperlukan dicantumkan perbendaharaan negara, perlu masuk kedalam peraturan pemerintah mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 yang berkaitan dengan laporan kinerja, merupakan gambaran umum yang secara singkat dan lengkap menggambarkan hasil yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Mahmudi dalam Halim dan Kusufi (2007 : 128), ia menyatakan bahwa “konsep *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik, oleh karena itu sering disebut sebagai inti dari pengukuran atau evaluasi kinerja. Nilai untuk uang juga menyiratkan apresiasi terhadap nilai uang. Artinya setiap rupiah harus dinilai dan digunakan dengan tepat”

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan hasil secara keseluruhan. Pengembangan indikator kinerja berfokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Ilmu ekonomi menganalisis masukan (*input*), efisiensi menganalisis masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak

(*outcome*). Dari ketiga unsur *value for money* tersebut, ada yang berpendapat bahwa tiga unsur saja tidak cukup, sehingga perlu ditambahkan dua unsur lagi, yaitu *fainess* dan *fairness*. Keadilan berarti bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau keistimewaan bagi kelompok tertentu. Keadilan atau pemerataan berarti pemerintah harus melaksanakan pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan mengutamakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk memanfaatkan kepentingan publik, mengevaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan rencana kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Sosial berupaya untuk memperkuat seluruh sumber daya yang ada, untuk itu disusun rencana strategis yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan teknis, dimana nantinya program strategis Dinas Sosial merupakan langkah awal dalam penyusunannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan akan dihitung pada setiap akhir tahun sebagai tolak ukur untuk membutuhkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan semua programkegiatan dan kegiatan.

Oleh karena itu, alasan penulis untuk meneliti dinas sosial kota Pekanbaru adalah dinas sosial merupakan salah satu satuan kerja (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sementara, dalam hal ini anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk pelaksanaan APBD yang dikelola. BUD Provinsi Riau, sehingga judul yang

diangkat pada Analisis *value for money* terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial sesuai dengan variabel dan fenomena yang akan dianalisis apakah kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan rencananya dengan baik, bekerja atau tidak dengan mengukur dan menganalisis pengukuran kinerja *value for money* dengan menggunakan hubungan 3E ,yaitu hubungan antara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Pengukuran kinerja sebagai alat untuk menghitung rasio akuntabilitas instansi pemerintah dengan memeriksa dan mengamati kinerja keuangannya dengan menghitung dan menganalisis pencapaian tujuan realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam nilai untuk kinerja organisasi sektor publik, seseorang tidak dapat menilai dari segi aoutpun yang dihasilkan saja, melainkan mempertimbangkan input, output, dan hasil keseluruhan.

Dinas Sosial merupakan instansi pelaksana pemerintah daerah yang tugas pokoknya meningkatkan pengelolaan Data Kesejahteraan Terpadu (DTKS), meningkatkan kebutuhan primer PMKS untuk rehabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan potensi sumber-sumber sosial. kesejahteraan (PSKS) yang berintegritas dan menumbuhkembangkan nilai- nilai kepeloporan, kepahlawanan dan solidaritas. pelayanan sosial kepada masyarakat, meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. setiap tahun ada program/kegiatan yang perlu diperhatikan kinerjanya.

Setiap tahun, dinas sosial kota Pekanbaru membuat program dan kegiatan. Berikut anggaran dan pelaksanaan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (dalam Rupiah)

NO	Program	2019		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,303,608,644	1,928,012,364	83.70
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	42,000,000	84.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,794,000	5,878,000	66.84

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (dalam Rupiah) (Lanjutan)

NO	Program	2019		%
		Anggaran	Realisasi	
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuditas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1,364,134,490	934,180,544	68.48
6	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	1,175,730,470	829,844,485	63.52
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	244,642,436	178,794,430	73.08
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	202,909,850	134,785,500	66.43

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (dalam Rupiah) (Lanjutan)

NO	Program	2019		%
		Anggaran	Realisasi	
9	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	416,309,617	403,773,700	96.99
	JUMLAH	5.766.129.507	4.457.269.023	77.30

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tabel 1.2
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (dalam Rupiah)

NO	Program	2020		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,937,469,347	1,527,147,779	78.82
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234,675,626	34,004,200	14.49
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11,660,400	11,660,400	100.00
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuditas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	2,789,321,000	1,182,085,970	86.74

Tabel 1.2
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (dalam Rupiah) (Lanjutan)

NO	Program	2020		%
		Anggaran	Realisasi	
6	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	1,593,123,075	1,027,806,360	64.52
7	Program Pembinaan anak Terlantar			-
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma			-
9	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)			-
10	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	185,588,850	179,328,750	96.63
	JUMLAH	5,325,360,571	3,962,003,459	74.40

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru periode 2019 dan 2020, pelaksanaan pengeluaran keuangan untuk masing – masing pelayanankota pekanbaru selama ini kurang dari yang dianggarkan. Pada Tahun 2019, terdapat 9 program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan pada Pada tahun 2020 terdapat 10 program yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru,

Tidak ada realisasi anggaran secara penuh pada tahun 2019 dan 2020. Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 adalah pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan presentasi sebesar 96,99% dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan presentasi sebesar 100.00%. sedangkan program dengan realisasi terendah pada tahun 2029 dan 2020 adalah Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSk, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya dengan presentasi sebesar 66,43% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan presentasi sebesar 14,49%. Banyaknya program yang tidak tercapai targetnya pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa anggaran dinas sosial kota Pekanbaru belum terserap secara maksimik.

program/kegiatan oleh dinas sosial dipertanggungjawabkan kinerjanya di lihat dari Lapora Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tahun 2020 dengan tahun 2019 (Tahun sebelumnya).

Tabel 1.3

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 (Tahun sebelumnya)

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020			KINERJA
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)	N/A	N/A	N/A	68	67.5	99.26	99.26
2	Meningkatkan kebutuhan dasar PMKS melalui perlindungan dari jaminan sosial	40	60.53	151.33	50	84.34	168.68	111.47
3	Meningkatkan kesejahteraan sosial (PSKS) yang berintegrasi serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisa, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	60	81.20	135.33	70	83.16	118.80	87.78
	Indek kepuasan masyarakat	81.26	80.013	90.47	82	80.8450	98.5915	100.13
	Nilai Evaluasi Akip	CC	B	115.65	B	B	100	86.47

Berdasarkan tabel diatas, penilaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru periode 2019 dan 2020 mendapatkan predikat B (Baik). pada tahun 2019 nilai hasil evaluasi yang diperoleh adalah sebesar 115,65 dan pada Tahun 2020 nilai hasil Evaluasi sebesar 100 sehingga mengalami penurunan sebesar 15.65.

Meskipun, realisasi dari anggaran selama ini lebih kecil dari target anggaran dan penilaian kinerja instansi pemerintah mendapatkan predikat B (Baik), hal itu belum menjamin bahwa pengeluaran tersebut sudah efektif dan efisien. Realisasi anggaran 2019 dan 2020 yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran masih belum terserap maksimal. Untuk melihat apakah pengeluaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah ekonomis, efektif dan efisien, maka dibutuhkan pengukuran kinerja. Salah satu cara dalam mengukur dan mengatur kinerja keuangan sektor publik adalah dengan menerapkan *value for money*.

Value for money dibutuhkan agar pengeluaran dapat digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang telah dibuat. Pengeluaran yang dimanfaatkan sebaik – baiknya akan memberikan *output* yang baik sehingga akan memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian dasar masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut dan pembahasan lebih lanjut mengenai masalah analisis kinerja keuangan dengan mengambil judul : **Analisis Value for Money Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.**

1.2. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis hanya membahas atau mengambil informasi pada Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru khusus dibidang sosialnya saja.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis ?
2. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi eefisien ?
3. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengukur kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis.
2. Mengukur kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi.

3. Mengukur Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai sarana yang tepat untuk menerapkan teori akuntansi dan apa yang telah diperoleh selama perkuliahan dan bahwa mereka dapat berbagi pengetahuan secara khusus dengan masalah konsep *value for money*.

2. Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangannya dan ikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan bagi dinas sosial kota Pekanbaru.

3. Peneliti lainnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti kasus serupa.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang pengertian atau definisi yang diambil dari kutipan buku yang terkait dengan penyusunan proposal. Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka tersebut, akan dihasilkan proposisi (pernyataan-pernyataan hipotetikal) yang biasa disebut dengan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, obyek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas mengenai gambaran umum identitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang yang dicapai, hasil yang ditunjukkan dan kemampuan untuk berkerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republi Indonesia, 2016). Sedangkan menurut Mangkunegara (2016), kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diperoleh.

Menurut Moehariono (2012:95) disebutkan bahwa kinerja atau *performance* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang adalah melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat di ketahui dan di ukur jika seorang individu atau kelompok pegawai telah memiliki tolak ukur kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang di tetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan sasaran yang di tetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak dapat di ketahui jika tidak ada tolak ukur keberhasilannya.

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa ahli di atas, maka dapat di simpulkan bahwa kinerja berasal dari istilah prestasi kerja (*job performance*), yaitu pekerjaan yang dapat di selesaikan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam mencapai

tujuan dan sasaran

2.2. Pengukuran Kinerja

pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi yang dinilai dari kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang terjangkau dan berkualitas. Apakah organisasi sektor publik tersebut mampu memberikan pelayanan publik yang terjangkau dan berkualitas. Jika organisasi sektor publik dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau dan berkualitas, maka organisasi tersebut akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari publik. Mengukur keberhasilan dalam organisasi sektor publik tidak semudah mengukur keberhasilan dalam organisasi bisnis”.

Menurut Mardiasmo (2002:121), menyatakan bahwa “sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu administrator publik mengevaluasi pencapaian suatu strategis melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai kontrol alat, karena pengukuran kinerja di perkuat dengan pembentukan sistem penghargaan dan hukuman.

Dapat di simpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya guna mencapai tujuan, visi dan misinya, serta memggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi. Individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas ekonomi, efesiansi, dan kegiatan perusahaan sehingga dapat pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta dapat di gunakan

sebagai sistem pengukuran kinerja dan alat pengendalian organisasi dan memperkuat dengan menetapkan *reward* and *punishment* sistem.

2.3. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:122) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan pengukuran kinerja, yaitu :

- a. Strategi komunikasi yang lebih baik (*top down* dan *bottom up*)
- b. Mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara seimbang sehingga kemajuan pencapaian strategi dapat dipantau.
- c. Menyambut pemahaman tentang kepentingan eksekutif tingkat menengah dan rendah dan memotivasi mereka untuk mencapai konsistensi tujuan
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan rasional individu dan kapasitas kolektif.

Menurut Mahmudi dalam Halim dan Kusufi (2007:14) mengatakan bahwa mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu :

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b. Menyediakan saran pembelajaran bagi pegawai.
- c. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.

- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Sujarweni (2015:107-108) mengatakan bahwa : Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik yaitu :

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan mialnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab public
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan
5. Mengalokaikan sumber daya
6. Untuk mengukur kinerja financial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategis.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik

2.4. Manfaat Pengukuran Kinerja

Sektor publik tidak lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial kekeorganisasian.

Menurut Mardiasmo (2002:122) mengatakan bahwa: Terdapat manfaat pengukuran kinerja, yaitu :

1. Memberikan pemahaman tentang ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen.
2. Berikan intruksi untuk membantu Anda mencapai sasaran kinerja yang Anda tetapkan
3. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan tujuan dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja.
4. sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian kinerja yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. sebagai alat komunikasi antara bawahan dan manajer untuk meningkatkan kinerja organisai
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
7. Pastikan keputusan dibuat secara objektif.

Menurut Bastian (2005:275) menyatakan bahwa “ pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang”.

Menurut Mardiasmo dalam Halim dan Kusufi (2009:125) disebutkan :

Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sektor publik yang dimaksud dengan sektor publik adalah untuk membantu pemerintah fokus pada maksud dan tujuan program satuan kerja untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk mencapai akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

2.5. Informasi Yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:123) dikatakan : Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu :

1. Keuangan : Evaluasi kinerja dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara kinerja yang sebenarnya dan yang dianggarkan.

Analisis Varians terutama berfokus pada :

- a. Varians pendapatan
- b. Variasi pembelanjaan
 - Varians investasi

- Varians belanja instansi/modal (*capital expenditure variance*)

Jika Anda menggunakan analisis varians, maka pelacakan varians akan menemukan penyebab varians tingkat penggerak yang tepat. Dengan cara ini, ditentukan unit mana yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dari tingkat manajemen yang paling rendah.

2. Non-finansial adalah jenis informasi yang dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variance*) atau bisa disebut factor keberhasilan kunci, factor hasil kunci, atau titik nadi. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasi factor-faktor yang mendorong keberhasilan bisnis. Variabel kunci memiliki beberapa sifat, antara lain:
 - a. Menjelaskan factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi.
 - b. Sangat fluktuatif dan dapat berubah dengan cepat.
 - c. Perubahan tidak dapat diprediksi.
 - d. Jika ada perubahan, diperlukan diambil tindakan segera.
 - e. Variabel-variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun dengan mengukur antara (pengganti) Contoh : kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi dapat dibuat ukuran keduanya, misalnya dengan banyaknya pengaduan, tuntutan, dan demonstrasi dapat menjadi variabel kunci.

2.6. Faktor Penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja

Sektor publik adalah industri yang berada dibawah tekanan untuk terus

meningkatkan bisnisnya dan memberikan produk dan layanan secara efisien dan mengurangi biaya pembayaran pajak. Dalam hal ini pengukuran kinerja merupakan alat yang berguna untuk mencapai tujuan tersebut, karena perlu memperhatikan hal-hal penting dalam pengukuran kinerja.

Menurut Sujarweni (2015:1) menyatakan bahwa “sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan Negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum, contohnya transportasi, pendidikan dan kesehatan.”

Menurut Mardiasmo (2002:2) ia menyatakan bahwa “istilah sektor publik merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, dimana setiap ilmu ekonomi, politik, hukum, dan sosial memiliki perspektif dan definisi yang berbeda-beda”. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang kegiatannya terkait dengan upaya untuk menghasilkan barang dan jasa publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Muindro (2013:2) menyatakan bahwa “sektor publik adalah suatu manajemen keuangan yang bersumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.”

Agar pengukuran kinerja dapat digunakan secara efisien dan efektif, diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengukuran kinerja yang dilakukan harus memperhatikan realitas nyata organisasi, artinya hasil pengukuran kinerja tersebut memang benar-benar menggambarkan realitas sebenarnya organisasi.
- b. Semua pihak yang terlibat dalam pengukuran kinerja harus memiliki riwayat bahwa mereka mengukur kinerja organisasi dan bukan merupakan bagian dari organisasi.
- c. Dukungan dari manajemen puncak, keterlibatan karyawan, pengembangan sistem komunikasi yang baik, kondisi kerangka kerja konseptual, dan prasyarat yang mengukur keberhasilan merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan penerapan pengukuran kinerja.
- d. Pengukuran kinerja adalah siklus berkelanjutan, yang berarti selalu siap untuk melacak perubahan dalam organisasi.

2.7. Karakteristik Indikator Kinerja

Indikator kinerja disamakan dengan ukuran kinerja, yang keduanya merupakan kinerja, tetapi berbeda dalam arti dan signifikansi. Dengan indikator kinerja, ada evaluasi kinerja tidak langsung, yaitu hal-hal yang mewakili indikator kinerja, sehingga bentuknya lebih kualitatif atau tidak dapat dihitung. Metrik kinerja, di sisi lain, adalah kriteria yang terkait dengan tinjauan kinerja tidak langsung untuk membuatnya lebih kuantitatif atau dapat diprediksi.

Kinerja diukur dengan mengembangkan variabel kunci yang telah diidentifikasi dalam indikator kinerja. Untuk menentukan tingkat pencapaian

kinerja, maka indikator kinerja tersebut dibandingkan dengan tujuan kinerja atau standar kinerja dan evaluasi kinerja, yang hasilnya dilaporkan kepada direktur pusat oertanggungjawaban, diverifikasi dan dilaporkan.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Ada bentuk-bentuk kinerja ini, yaitu :

- a. Faktor keberhasilan utama organisasi yang paling penting (*critical success factors*) adalah area di mana, dalam kondisi waktu tertentu, perhatian diberikan pada variabel keuangan dan non-keuangan yang penting. Jadi factor penentu keberhasilan harus secara konsisten mengikuti perubahan dalam organisasi.
- b. Indikator kinerja kunci (*key performance indikator*) merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfiannsial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Manajer dapat menggunakan indicator kinerja utama untuk mengidentifikasi dan memantau keberhasilan kinerja.

Menurut Bastian (2005:267) dikatakan “Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan derajat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (dampak dan efek).

Maksud dari indikator input, output, outcome, manfaat dan dampak adalah :

- a. Indikaor input adalah semua yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai output. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, pedoman, peraturan perundang-

undangan, dll.

- b. Indikator keluaran (outputs) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa kegiatan fisik dan/atau non fisik.
- c. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang, dalam jangka menengah, mencerminkan pengoperasian hasil kegiatan (efek langsung)
- d. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang terjadi baik secara positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah dibuat.

Menurut Mahmudi dalam Halim dan Kusufi (207:131) mengatakan bahwa indikator kinerja yang akan dikembangkan memiliki karakteristik yaitu :

1. Sederhana dan mudah dipahami.
2. Dapat diukur
3. Dapat dikuantitatifkan ; misalkan dalam bentuk rasio, presentase dan angka
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja
5. Berfokus pada customer, service, kualitas dan efisiensi
6. Dikaji secara teratur.

2.8. Manfaat Indikator Kinerja

Menurut Mahmudi (2015: 91) menyatakan bahwa “indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi. Informasi kinerja tersebut

diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajaran (*learning organization*).”

Menurut Bastian (2005: 269) mengatakan bahwa:

Manfaat indikator kinerja dapat dipertimbangkan menjadi enam, yaitu:

1. Kejelasan tujuan organisasi
2. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas
3. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas
4. Tersedia perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda
5. Tersedia fasilitas *setting of target* untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada pemilik saham.

2.9. Peran Indikator Kinerja Bagi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002: 128) mengatakan bahwa:

Peran indikator kinerja bagi pemerintah, antara lain:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan

5. Untuk menunjukkan standar kinerja
6. Untuk menunjukkan efektivitas
7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan
8. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

2.10. Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja adalah kinerja/hasil suatu kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai secara kuantitas dan kualitas yang terukur relatif terhadap penggunaan anggaran. Kinerja keuangan sebagai penentuan tolak ukur yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan pendapatan.

Menurut Handoko (2016: 56) menyatakan bahwa “kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.” Menurut Fahmi (2018: 142) menyatakan bahwa “kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar”.

Menurut Isna dan Ayu (2015: 78) mereka menyatakan bahwa “kinerja keuangan adalah salah satu isu terpenting yang dikaji dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, mengingat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,

semua pemerintah harus untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah yang baik dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomian kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan pengertian kinerja keuangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau perbandingan kualitas atau kuantitas, baik fisik maupun mental, skala maupun non psikologis merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan termasuk pendapatan, Pembayaran dan status pembayaran. Alokasi dana biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas untuk mencapai tujuan, visi dan misi peningkatan perusahaan.

2.11. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi.

Menurut Srimindarti dalam Rahayu (2006: 34) menyatakan bahwa “penilaian kinerja adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.”

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.12. Realisasi Anggaran

Menurut Bastian dalam Rahayu (2010: 231) menyatakan bahwa “Realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah “*operational management*”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien.”

Bagi manajer atau pengelola organisasi, isu utama dalam proses realisasi anggaran adalah kualitas, yang kemudian akan menjadi senjata dalam menghadapi persaingan. Namun, tekanan pada kualitas tidak berarti bahwa manajer dapat mengabaikan penghapusan penting antara kualitas dan biaya, serta waktu dan fleksibilitas. Tantangan yang muncul kemudian adalah menghasilkan kualitas produk dan jasa secara efisien.

2.13. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Menurut Siregar (2015: 82) menyatakan bahwa “laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola pemerintah dalam suatu periode.”

Menurut Erlina (2015: 23) mengatakan bahwa:

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran, sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan

modal oleh pemerintah.

2.14. Value For Money

2.14.1 Pengertian Value For Money

Menurut Mahmudi dalam Halim dan Kusufi (2007: 128) menyatakan bahwa “konsep *Value For Money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik, VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya.”

Menurut Mardiasmo (2002: 4) dikatakan: Value for money adalah konsep manajemen organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

- 1) **Ekonomi:** memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi adalah perbandingan nilai *input* dan *output* yang dinyatakan dalam unit moneter. Ekonomi mengacu pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan sumber daya input yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak produktif.
- 2) **Efisiensi:** mencapai kinerja maksimum dengan input yang diberikan atau menggunakan input yang terendah untuk mencapai output yang diberikan. Efisiensi merupakan perbandingan antara output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target kinerja yang telah ditetapkan.

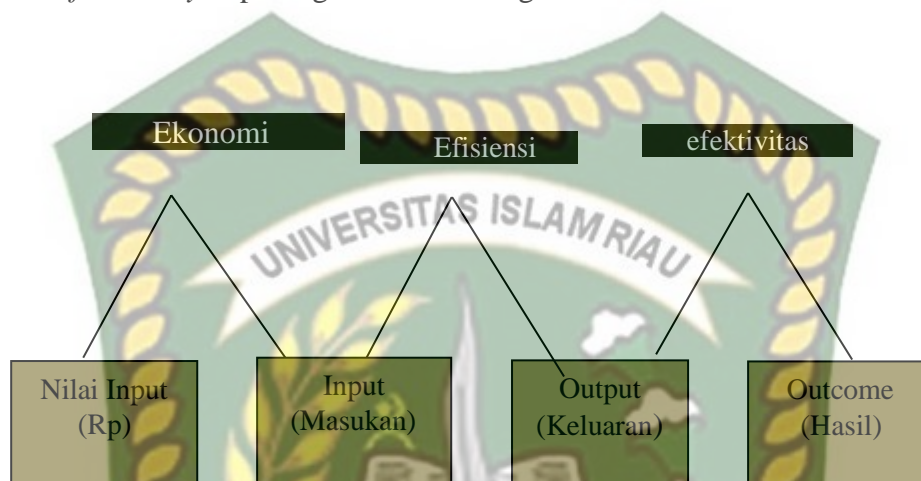
- 3) Efektivitas: derajat pencapaian hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebenarnya, efektivitas adalah perbandingan hasil dan hasil.

Menurut Bastian (2005: 279) dikatakan : *Value For Money* meliputi penilaian dengan 3E, yaitu:

- a. Ekonomis: hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan.
- b. Efisiensi: hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu.
- c. Efektivitas: hubungan antara produk dan tujuan, di mana efektivitas diukur dengan sejauh mana tingkat produk, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.14.1 Gambaran skematis

Menurut Mardiasmo (2002: 5) mengatakan bahwa: Secara skematis, *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skematis *value for money*

- 1) **Input:** Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh input: dokter dirumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru disekolah dan sebagainya. Input dapat dinyatakan ecara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, jumlah guru dan sebagainya. Input dapat pula dinyatakan dengan nilai uang, mislanya biaya dokter, harga tanah, gaji guru dan sebagainya.
- 2) **Output:** Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program, dan aktivitas.
- 3) **Outcome:** outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Penetapan dan pengukuran terhadap outcome seringkali lebih sulit dibanding penetapan dan pengukuran terhadap input maupun output. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa outcome lebih sulit ditetapkan

dan diukur, yaitu:

- Outcome sering kali tidak dapat diekspresikan dalam cara yang sederhana yang memudahkan proses monitoring (pemantauan).
- Adanya masalah politik dalam proses penetapan outcome.
- Dalam penentuan outcome sangat perlu untuk mempertimbangkan dimensi kualitas. Jika input sudah dapat diturunkan, output yang dihasilkan sudah meningkat, operasi sudah lebih ekonomis dan efisien, tetapi apa yang dihasilkan ternyata tidak berkualitas, tentu akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Halim dan Kusufi (2018: 132) mengatakan bahwa: Dalam Pengukuran kinerja menjelaskan konsep dasar menentukan indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator Input

Input adalah semua jenis sumber daya input yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input terbagi menjadi dua yaitu input primer dan input sekunder. Input primer adalah uang tunai, sedangkan input sekunder adalah bahan baku, personel, infrastruktur, dan input lain yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Input primer harus diubah menjadi input sekunder sebelum dapat diproses menjadi output tertentu.

Input metering adalah ukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses untuk menghasilkan output. Proses tersebut dapat berbentuk program atau kegiatan. Pengukuran input dilakukan dengan

cara membandingkan input sekunder dengan input primer, yaitu sebagai ukuran ekonomis untuk menentukan biaya per unit input (biaya input). Biaya input ditentukan dengan menggunakan akuntansi biaya dengan sistem perhitungan. Indikator input saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan penentuan indikator output, yaitu pengukuran ekonomi saja tidak cukup tanpa efisiensi menjadi prioritas.

b. Indikator Output

Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran kinerja adalah pengukuran kinerja yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil dari menjalankan program atau aktivitas.

c. Indikator Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome memiliki nilai yang lebih tinggi nilainya dari produk, karena produk hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan hasil mengukur kualitas produk dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, hasil adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

2.15. Indikator Value For Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi, efektivitas program dan kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2002: 131) mengatakan bahwa:

Berikut ini dijelaskan mengenai konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E, sebagai berikut:

1. Indikator Alokasi Biaya (Ekonomi dan Efisiensi)

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup pengelolaan dengan hati-hati atau cermat (*prodency*) dan tidak ada pemborosan. Kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak terlalu. Efisiensi adalah produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2. Indikator Kualitas Pelayanan (Efektivitas)

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Proses kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

2.16. Manfaat Implementasi *Value For Money*

Tentu ada manfaat bagi organisasi itu dan masyarakat untuk menggunakan konsep *value for money* dalam mengukur kinerja di organisasi sektor publik. Manfaat yang diinginkan dalam penerapan *value for money* di

organisasi sektor publik adalah : ekonomis (hemat yang cermat) dalam perolehan dan alokasi sumber daya, efisien (efisien) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (efektif) dalam mencapai tujuan dan tamat.

Menurut Mardiasmo (2002: 7) mengatakan bahwa: Manfaat Implementasi *Value For Money* ada lima, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
4. Lebih banyak alokasi kepentingan publik
5. Peningkatan kesadaran akan uang publik (*awareness of public cost*) sebagai akar dari pelaksanaan akuntabilitas publik

Dari berbagai manfaat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *value for money* dalam untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik, sangat berguna bagi suatu instansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan tepat sasaran agar tercipta pelayanan yang berkualitas dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

2.17. Pengukuran Kinerja Value For Money

Mengukur kinerja *Value For Money* adalah bagian terpenting dari setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Untuk meningkatkan kinerja sektor publik, maka manajemen kinerja sektor publik tersebut harus dilengkapi dengan

sistem pengukuran kinerjanya. *Value for money* adalah kunci untuk mengukur kinerja di sektor publik, sehingga sistem pengukuran kinerja sektor publik juga harus fokus pada pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mahmudi dalam Rahayu (2015: 89) menyatakan bahwa “rantai value for money memiliki 3 elemen utama, yaitu input, output, outcome. Berdasarkan ketiga elemen tersebut organisasi dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Namun pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tidak dapat langsung dilakukan karena untuk mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas diperlukan pengembangan indikator kinerja (IK) dalam desain sistem pengukuran kinerja organisasi.”

2.17.1 Rasio Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2002: 131) menyatakan bahwa “Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan.”

Menurut Mahmudi dalam Halim dan Kusufi (2007: 129) menyatakan bahwa “ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur) dengan input primer (kas). Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya apabila diatas anggaran maka terjadi pemborosan.”

2.17.2 Rasio Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2002: 133) menyatakan bahwa “efisiensi adalah hal yang paling penting dari ketiga pokok bahasan Value For Money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Apabila semakin besar output dibanding input,

maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.”

Menurut Mahmudi (2007: 129), “efisiensi berkaitan dengan hubungan antara produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Secara matematis, efisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang paling sedikit (*good spending*).”

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan pengeluaran actual standar pengeluaran. D a l a m m e n e n t u k a n standar belanja, aspek ekonomi dan standar minimal pelayanan publik minimum yang harus dipenuhi juga diperhatikan.

2.17.3. Rasio Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2002: 134) menyatakan bahwa “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Menurut Halim dan Kusufi (2018: 130) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran

efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*).”

Menurut Mardiasmo (2002: 4) menyatakan bahwa “efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.”

2.18. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan yang mengatur sifat dan kualitas pelayanan dasar, yang merupakan urusan wajib pemerintah yang paling sedikit haknya dimiliki oleh setiap warga negara. Perancang sistem manajemen kinerja sektor publik tidak lepas dari penetapan standar pelayanan publik. Manajemen kinerja sektor publik tidak lengkap jika tidak memiliki seperangkat standar pelayanan publik yang menjadi acuan tindakan manajemen.

Standar Pelayanan Publik adalah standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Untuk memenuhi standar pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus menetapkan standar pelayanan minimal. Dalam peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan dan Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal menetapkan aturan yang lebih rinci tentang standar pelayanan minimal. Menurut peraturan negara, standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan kualitas pelayanan dasar, yang dianggap sebagai masalah daerah yang bersifat imperative dan paling tidak dimiliki oleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan standar pelayanan minimal bertujuan untuk menjamin akses dan

kualitas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar dari pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib memperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan minimal baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan minimal yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan akuntabel, serta batasan kinerja yang dapat pencapaian yang dapat dilaksanakan secara bertahap.

2.19. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik (LAKIP)

LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan yang memuat tanggung jawab dan kinerja dari suatu instansi pemerintah yang mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dan merupakan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Penyelenggaraan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Untuk Kewenangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, wajib menyampaikan Laporan tanggung jawab Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud kewajiban menyampaikan kepada instansi pemerintah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan secara berkala melalui alat pertanggungjawaban pada tingkat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan

sumber daya yang pelaksanaan yang dipercayakan kepada otoritas berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LAKIP juga berfungsi sebagai alat monitoring, alat evaluasi, dan alat penggerak untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dan berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik.

2.20. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi review penelitian ini. Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama penelitian, tahun penelitian, metode yang digunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Triniyati (2018)	Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> Periode 2015-2017	Analisis Deskriptif dan kualitatif	<p>Penelitian ini mengukur kinerja, pada periode 2015-2017 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dari rasio ekonomis, keseluruhan dinilai ekonomis.</p> <p>Dari rasio efisiensi, laporan kinerja Dinas Pertanian kabupaten Simalungun pada tahun 2015 dan 2016 berada tingkat efisien dan 2017 berada pada tingkat efisien berimbang.</p> <p>Dari elemen efektivitas pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun mencapai kinerja rata-rata efektivitas.</p>
2	Amilia Putri (2020)	<i>Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</i>	Deskriptif dan Kualitatif	<p>Provinsi Jawa Timur berdasarkan analisis <i>value for money</i> pada program kesehatan masyarakat dari tahun 2016-2018 dikategorikan ekonomis, efisien, dan efektif. Akan tetapi, pada tahun 2018 program kesehatan masyarakat dikategorikan tidak efektif. Pada program perbaikan gizi masyarakat dari tahun 2016-2018 dikategorikan ekonomis, efisien, dan tidak efektif.</p>

				Sedangkan pada program kefarmasian, alat kesehatan dan pengamanan makanan dari tahun 2016-2018 dikategorikan ekonomis, efisien, dan tidak efektif.
3	Eka Febyanti Rahayu (2020)	Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin Tahun 2016-2019	Analisis Deskriptif dan Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengukuran ekonomi, efisien, dan efektivitas pada Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin Tahun 2016-2019, hasil perhitungan rasio ekonomi dapat diketahui bahwa telah memenuhi kriteria ekonomis dan cukup ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan setiap tahunnya.</p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, kinerja keuangan distrik navigasi kelas II Banjarmasin periode tahun 2016-2019 adalah kurang efisiensi, disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di distrik navigasi kelas II Banjarmasin menjadi kurang efisien dalam pembelanjaan.</p> <p>Efektivitas, berdasarkan hasil analisis pengukuran rasio efektivitas terhadap distrik navigasi kelas II Banjarmasin diketahui bahwa telah memenuhi kriteria yang sangat efektif.</p>
4	Dwi Purwiyanti (2017)	Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik	Kualitatif dan Kuantitatif	<p>1. Ditinjau dari rasio ekonomi, kegiatan fisik pekerjaan irigasi danggala kodi tahun 2014 telah mampu</p>

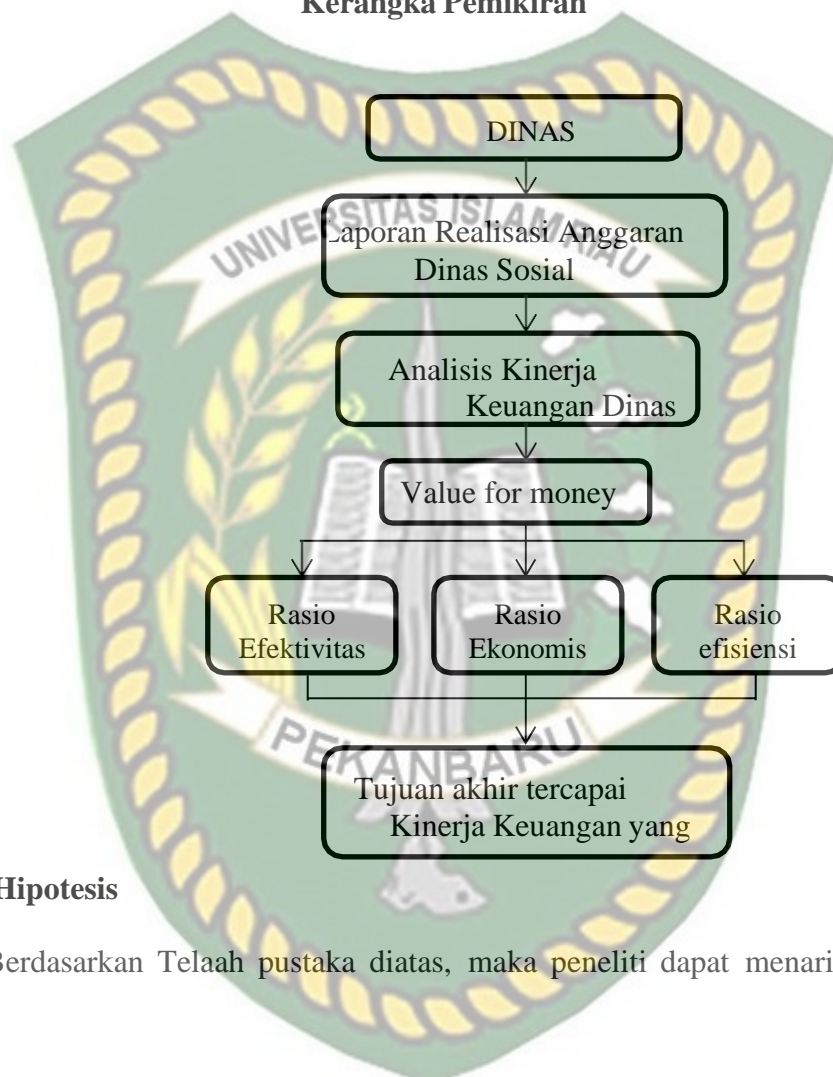
		Pekerjaan Irigasi DonggalaKodi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)		menjalankan pekerjaan secara ekonomis. 2. Ditinjau dari rasio efisiensi, kegiatan fisik pekerjaan irigasi donggala kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan secara efisiensi. 3. Ditinjau dari rasio efektivitas, kegiatan fisik pekerjaan irigasi donggala kodi tahun 2014 telah menjalankan keseluruhan pekerjaannya dengan efektif.
5	Imanuel, David dan Steven (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi SulawesiUtara Berdasarkan Konsep Value For Money	Analisis deskriptif dan kualitatif	1. Rasio ekonomi dari tahun 2015-2017 menunjukkan kinerja keuangan pemerintah provinsi sulawesi utara dinilai ekonomis. 2. Rata-rata rasio efisiensi tahun 2015-2017 menunjukkan kinerja keuangan pemerintah provinsi sulawesi utara dinilai efisiensi. 3. Rasio efektivitas dari tahun 2015- 2017 menunjukkan kinerja keuangan pemerintah provinsi sulawesi utara dinilai cukup efektif.

2.2.1. Kerangka Pemikiran

Tabel 2.3

Kerangka Pemikiran

3.



2.2.2. Hipotesis

Berdasarkan Telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu:

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum memenuhi prinsip *value for money*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara data diperoleh lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan metode ini karena bermaksud untuk mengetahui kinerja sistem keuangan pada Dinas Sosial kota Pekanbaru, serta apakah kinerja keuangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah ekonomis, efektif dan efisiensi.

3.1. Lokasi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Parit Indah Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

3.2. Definisi Variabel Penelitian

3.2.1 Value For Money

Value for money adalah metode untuk mengukur apakah sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan sudah mengelola kinerja keuangan dengan baik sesuai dengan 3 elemen dalam *value for money* yaitu Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi. Berikut cara mengukur kinerja keuangan dengan

metode *value for money* adalah :

A. Ekonomi

Menurut MaHMUDI (2010) cara mengukur tingkat ekonomi adalah :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran

Angka input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Nilai Input : Anggaran

Angka nilai input yang dimaksud adalah angka target anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Menurut Mahsun (2006), kriteria ekonomis adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis atau sangat ekonomis
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis

B. Efisiensi

Efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efisien

menyangkut pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu (Purwiyanti, 2017)

Menurut Mahmudi (2010) cara mengukur tingkat efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Realisasi belanja : realisasi belanja adalah angka pengeluaran dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Realisasi pendapatan : realisasi pendapatan adalah angka laporan pendapatan dari setiap program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Menurut Mahsun (2010) kriteria efisiensi adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang atau cukup efisien
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efisien atau sangat efisien

C. Efektivitas

Efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan

target yang ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2010) cara mengukur tingkat Efektivitas adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Hasil (outcome)}}{\text{Rencana Hasil (output)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program- program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Menurut Mahsun (2006) kriteria efektivitas adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat efektif

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif. Data ini diperoleh langsung dari subjeknya, namun masih harus dilakukan pengolahan lebih lanjut mengenai data target dan realisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun anggaran 2019 dan 2020.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data-data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dan tidak di publikasikan ke khalayak umum.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari segala informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, buku-buku, atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya. Laporan yang diolah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2019 dan 2020.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui metode *value of money* dengan melihat 3 elemen, yaitu elemen ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dari pengukuran elemen ini, kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan lalu melakukan analisa dari hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah

kinerja keuangan Dinas Sosial kota Pekanbaru sudah baik atau belum. Data-data untuk menghitung ketiga elemen ini didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Sosial Kota Pekanbaru terletak di pusat di kota Pekanbaru, yang berlokasi di Jl. Parit Indah Simpang Datuk Setia Maharaja No.6 Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki visi, yaitu “ Terwujudnya Kesejahteraan sosial masyarakat, melembaganya semangat kepahlawanan sosial, serta pemantapan aparatur”. Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga memiliki misi 7, yaitu :

- meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
- Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis melalui nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.
- Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
- Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti.
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, perencanaan serta kerjasama program bidang sosial.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas di Lingkungan Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah Kota Pekanbaru di bidang kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi :

1. Melaksanakan tugas pembinaan kewenangan di bidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. melaksanakan tugas rencana program di bidang Pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melaksanakan pengelolaan, pelaksanaan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Melaksanakan pembinaan, pelatihan keterampilan dan memberi bantuan kepada masyarakat untuk usaha kesejahteraan Sosial.
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan kepada klien yang sudah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pelaksanaan dan pengolahan serta penguumpulan data, informasi serta evaluasi kegiatan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

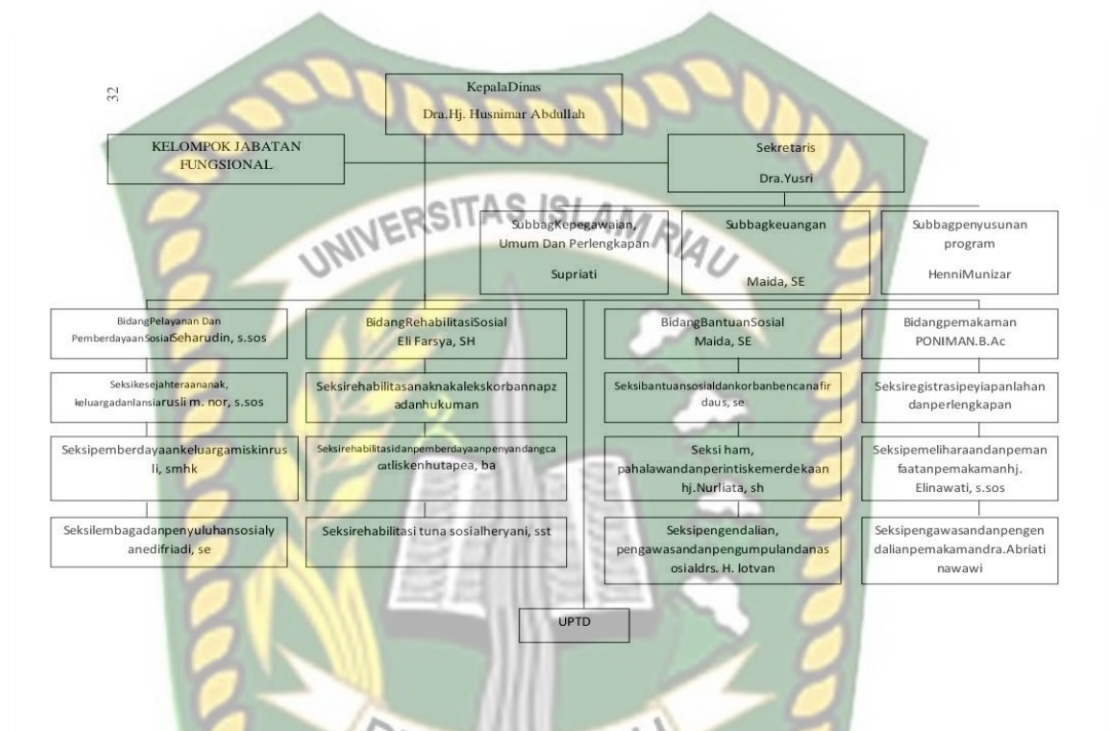
7. melaksanakan tugas antara instansi tersebut, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pelaksanaan administrasi umum, melaksanakan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pelaksanaan tugas Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pengurus Karang Taruma dan lembaga Sosial masyarakat di kelurahan/desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- (1) Kepala badan menyelenggarakan fungsi walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan fungsi lainnya.
- (2) Kepala dinas kesejahteraan sosial melakukan tugas-tugas berikut ketika melakukan tugas-tugas sesuai dengan :
 - a. Perencanaan kebijakan khusus di bidang sosial.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembentukan unit pelaksanaan teknis sebagai bagian dari tugasnya.
- d. Administrasi urusan resmi
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh walikota dalam ruang lingkup fungsi dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Tugas sekretariat adalah merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi penjabaran program dan anggaran dinas sosial kota Pekanbaru.
 - b. Perencanaan, persiapan, perumusan dan pelaksanaan, serta koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. Melakukan kegiatan administrasi umum sumber daya manusia dan administrasi, manajemen keuangan, manajemen asset dan peralatan, dan persiapan program.
 - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan untuk pertemuan resmi, upacara dan protocol.

- e. Koordinasi , pembinaan, penyusunan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai tanggung jawab.
- f. Koordinasi dan promosi pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan sekitarnya, kendaraan perusahaan dan peralatan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum mempunyai rincian tugas rinci merancang, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Subbagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan administrasi, domestik dan kearsipan.
 - b. Pengelolaan tuga, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. Pengelolaan tugas, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan pengolahan data dan informasi subbagian umum..
 - d. Manajemen tugas protocol, pelaksanaan dengan badan sesuai dengan ruang lingkup tindakan dan layanan hubungan masyarakat.

- e. Pelaksanaan tugas resmi dan operasi domestik.
- f. Pelaksanaan kepemilikan daerah juga meliputi perencanaan dan penganggaran kepemilikan daerah, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, serta kebutuhan pengamanan dan pemeliharaan.
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan struktur dan infrastruktur.
- h. Pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa.
- i. Melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- j. Penyusunan dan koordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan kantor dan halaman, disiplin pegawai dan keselamatan di lingkungan kantor.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Divisi Keuangan

- (1) Divisi Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program kerja Divisi Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagian keuangan dalam melaksanakan tugas-tugas berikut dalam pelaksanaan tugas-tugas yang disebutkan dalam ayat 1 :
 - a. Penyiapan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- c. menyiapkan tugas penyusunan, pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program.
- d. Memfasilitasi dan menyusun tindak lanjut atas laporan masyarakat, temuan auditor, pengawasan lainnya.
- e. Pengelolaan aset meliputi akuntansi, investiasi dan pelaporan properti daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Pembuatan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

5. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam pelaksanaan sub usaha perlindungan sosial korban bencana.
- (2) Bagian Perlindungan Sosial Korban Bencana dalam melaksanakan tugas-tugas berikut dengan melakukan tugas-tugas yang ditentukan dalam ayat 1 :
 - a. merumuskan dan menyiapkan tugastim kerja yang menentukan jenis dan ruang lingkup tim kerja yang diperlukan di tempat kerja untuk memudahkan pengumpulan dan melaksanakan.
 - b. Perumusan serta penyusunan rencana kerja yang merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan.

- c. Penyelenggaraan bantuan perlindungan terhadap korban bencana, penyiapan dapur umum dan penyuluhan korban, pemulangan pengungsi, korban bencana, orang terlantar atau terdampar di daerah.
- d. Pengembangan dan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi korban ganguan massal dan hak asasi manusia.
- e. Pengembangan dan pelaksanaan saran dan dukungan di daerah bencana.

6. Departemen Pengawasan dan Pengadilan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial

- (1) Departemen Pengawasan dan Pengadilan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab membantu Departemen Jaminan Sosial dan perlindungan untuk melaksanakan subtransaksi pengawasan dan pengendalian sumber Dana Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagian pemantauan dan pengendalian sumber dana jaminan sosial dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas sebagaimana:
 - a. Pengembangan dan pelaksanaan tim kerja dan tim kerja, menentukan jenis dan ruang lingkup peralatan kerja yang diperlukan dalam penyusunan dan penjabaran rencana kkerja Detil dan penyusunan program kegiatan yang dilakukan.
 - b. Penyusunan dan pengumpulan data dari sumber dana sosial yang berasal dari bermarks.

- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kegiatan yang optimal dan efektif.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman di daerah bencana.

7. Bagian Perlindungan dan Perawatan Lansia Terlantar

- (1) Bagian Perlindungan dan Perawatan lansia Terlantar mempunyai tugas membantu Kepala Departemen Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub usaha perlindungan dan perawatan lansia terlantar.
- (2) Bagian Perlindungan dan Perawatan Lansia Terlantar dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan penjabaran rencana kerja yang merinci dan memprogram kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan pendataan lanjut usia terlantar.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap Lanjut Usia Terlantar.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dan jaminan sosial bagi lanjut usia (Aslut) bagi lanjut usia non potensial.
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan orientasi dan pemberian bantuan bagi lansia terlantar di panti asuhan.

8. Bagian Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sosial

- (1) Bagian Rehabilitasi pekerja Sosial, mempunyai tugas membantu kepala Dinas Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub usaha Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sosial, Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- (2) Bagian rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas-tugas :

- a. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas sehingga dapat diverifikasi bahwa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana kerja, tolak ukur keberhasilan tugas yang ditetapkan.
- b. Penyusunan dan penyiapan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kepala bidang , membuat pedoman, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, catatan hasil kerja dan laporan di bidang tanggung jawabnya.
- c. Pembuatan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pendataan penyandang disabilitas sosial.

9. Dinas Pemberdayaan dan Penyalahgunaan Sosial

- (1) Dinas Pemberdayaan dan Penyalahgunaan Sosial mempunyai tugas mendukung sebagai fungsi pengelola pelayanan dalam pelaksanaan sub usaha pemberdayaan dan pengobatan masyarakat miskin.
- (2) Dinas Pemberdayaan Sosial dan pemberdayaan masyarakat Miskin melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, orientasi dan perumusan nasihat dan pengendalian, serta kekurangan tunjangan sosial bagi keluarga, lembaga sosial dan pemberian hadiah, dukungan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
 - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan perumusan pembinaan dan pengendalian profesi program bakti sosial dan pemberdayaan sosial.

- c. Pelaksanaan pengembangan dan perumusan database orang dengan masalah bantuan sosial (PMKS) dan kemungkinan sumber bantuan sosial (PSKS) di bidang pekerjaannya..

4.2. Hasil Perhitungan *Value For Money* dinas sosial kota Pekanbaru Tahun 2019 dan 2020

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki program-program setiap tahunnya. Pada setiap program, terdapat kegiatan yang harus di laksanakan setiap tahunnya. Setiap program membutuhkan anggaran agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Setiap pertanggungjawaban kegiatan di tulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sosial kota Pekanbaru.

Di dalam LAKIP dinas sosial kota Pekanbaru, terdapat 9 program yang dijalankan pada tahun 2019. Berikut merupakan nama program dengan kegiatannya masing-masing.

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019

No.	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor - Penyediaan alat tulis menulis - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

		<p>kinerja SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya - Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS - Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial - Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar

		biasa - Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik bagi lanjut usia
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
8	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat

Sumber : Lakip Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019

Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki 11 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur memiliki 1 kegiatan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki 1 kegiatan, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 3 kegiatan, program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya memiliki 2 kegiatan, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial memiliki 7 kegiatan, program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma memiliki 1 kegiatan, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya

Pada tahun 2020, terdapat 10 program yang dijalankan oleh Dinas Sosial

Kota Pekanbaru. Berikut merupakan nama program beserta kegiatannya.

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis menulis - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berskala gedung kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota

	Aparatur	Pekanbaru
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah keajahteraan sosial (PMKS) lainnya - Peningkatan kemampuan (capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya - SLRT kota pekanbaru
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dan perlindungan sosial, hokum bagi korban eksploitasi,, perdagangan perempuan dan anak - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal - Peningkatan kualitas pelayanan,

		<p>sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial - Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik bagi lanjut usia
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	<ul style="list-style-type: none"> - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
9	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi eks Penyandang penyakit sosial - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Sumber : Lakip Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2020

Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki 11 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki 2 kegiatan, program peningkatan kapasitas daya aparatur memiliki 1 kegiatan, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 3 kegiatan, program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya memiliki 4 kegiatan, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial memiliki 7 kegiatan, program pembinaan anak terlantar memiliki 1 kegiatan, program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma memiliki 1 kegiatan, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narapidana dan penyakit sosial lainnya) memiliki 2 kegiatan, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial memiliki 1 kegiatan.

Terdapat 3 elemen dalam perhitungan *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mahmudi (2010) cara mengukur tingkat ekonomis adalah :

$$\text{Ekonomis} = \text{Realisasi anggaran} : \text{anggaran APBD} \times 100\%$$

Dimana input merupakan realisasi anggaran dan nilai input merupakan anggaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Berikut merupakan perhitungan elemen ekonomis pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,560,000	7,560,000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246,976,000	363,000,000	68.04%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	446,805,930	556,999,100	80.22%
		Penyediaan Jasa Kebersihan	169,718,410	175,099,100	96.93%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33,511,000	38,351,000	87.28%
		Penyediaan Alat Tulis Menulis	163,624,340	174,843,460	93.58%

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121,536,250	125,373,750	96.94%
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerang Bangunan kantor	24,936,220	28,472,720	87.58%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,240,000	9,240,000	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	270,594,950	278,865,780	97.03%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	433,508,620	545,803,044	79.43%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penggadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	50,000,000	100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,998,000	2,998,000	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2,880,000	2,898,000	99.38%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,898,000	-	-
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuditas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	603,003,044	700,268,490	86.11%
		Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin	331,177,500	663,866,000	49.89%

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	-	-	-
		Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS	87,849,000	87,946,424	99.89%
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	31,640,110	31,640,110	100%

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	298,076,720	303,499,110	98.21%
		Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	183,977,260	187,588,416	98.07%
		Penangan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	121,786,395	255,768,535	47.62%
		Peningkatan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik Bagi Lanjut Usia	106,287,565	309,287,565	34.37%
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	178,794,430	244,642,436	73.08%

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

8	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Eks Penyandang Penyakit Sosial	13,921,880	13,929,880	100%
		Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	120,864,500	188,979,880	63.96%
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	419,309,617	419,309,617	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan table 4.3. terdapat 2 kegiatan tidak tereliasasi dan 19 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan 7 kegiatan dengan nilai ekonomis sebesar 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan ekonomis pada kegiatan di tahun 2020. Berikut perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2020.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,475,000	5,475,000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284,500,574	339,600,000	83.76%
		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	524,000,486	720,328,796	72.74%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	153,694,060	160,120,590	95.99%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29,601,000	33,887,403	87.35%
		Penyediaan Alat Tulis Menulis	119,040,940	127,143,040	93.63%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66,120,850	71,989,100	91.85%
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	20,472,720	28,472,720	71.90%

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,240,000	9,240,000	35.06%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	118,545,000	210,330,000	56.36%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	202,603,984	230,882,698	87.75%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	29,860,000	29,875,626	99.95%
	Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berskala Gedung Kantor	4,144,200	240,800,000	17.21%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan kota pekanbaru	-	-	-

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,828,000	5,828,000	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2,887,950	2,887,950	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,944,450	2,994,450	100%
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	397,940,100	398,669,900	99.82%

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Peningkatan Kemampuan (<i>capacity Building</i>) petugas dan pedamping Sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	5,173,400	5,473,400	94.52%
		Peningkatan Manajemen Usaha Bagi keluarga Miskin	543,143,000	691,197,675	78.58%
		SLRT Kota Pekanbaru	250,002,870	267,502,300	93.46%
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	-	-	-
		Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMK	361,864,000	546,528,500	66.21%

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	-	-	-
		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	222,225,140	291,929,500	76.12%
		Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	172,980,000	-	-

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Penangan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian luar biasa	443,717,220	581,630,520	76.29%
		Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik bagi Lanjut Usia	-	-	-
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Anak Terlantar	-	-	-
8	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	-	-
9	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	-	-	-
		Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial	-	-	-

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	179,152,200	415,152,200	43.15%
----	---	--	-------------	-------------	--------

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan table 4.4, terdapat 9 kegiatan yang tidak tereliasasi, dan terdapat 20 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 4 kegiatan dengan nilai ekonomis sebesar 100%.

Elemen *Value For Money* kedua adalah efisiensi, menurut Mahmudi (2010) cara mengukur tingkat efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \text{realisasi belanja} : \text{realisasi pendapatan} \times 100\%$$

Dimana realisasi belanja merupakan anggaran pengeluaran kegiatan dan realisasi pendapatan merupakan persentase pendapatan anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Berikut merupakan perhitungan elemen efisiensi pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2019.

Tabel 4.5.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi belanja	Realisasi pendapatan (%)	Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,560,000	100%	756%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	46,976,000	68.04%	6.91%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	446,805,930	80.22%	55.6%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	169,718,410	96.93%	17.5%

Tabel 4.5.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja	33,551,000	87.38%	3.84%
	Penyediaan alat tulis menulis	163,624,340	93.58%	17.48%
	penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	121,536,250	96.94%	12.54%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,936,220	87.58%	28.47%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,240,000	100%	92.40%
	Penyediaan makanan dan minuman	270,594,950	97.03%	27.89%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	433,508,620	79.43%	54.58%

Tabel 4.5.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

2	Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50,000,000	84.00 %	59.52%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,998,000	100 %	29.98%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2,880,000	99.38 %	28.97%
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2,898,000	-	28.98%
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuditas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	603,003,004	86.11 %	70.03%
		Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	331,177,500	49.89 %	66.38%

Tabel 4.5.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi, Perdagangan perempuan dan Anak	-	-	-
		Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS	87,849,000	99.89%	97.94%
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	31,640,110	100%	31.64%
		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	298,076,720	98.21%	30.35%

Tabel 4.5.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

		Penyusunan kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	183,977,260	98.07 %	18.75%
		Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tangguh cepat darurat dan kejadian luar biasa	121,786,395	47.62 %	25.57%
		Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Publik bagi Lanjut Usia	106,287,565	34.44 %	30.86%
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks Trauma	178,794,430	73.08 %	24.46%
8	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Eks	13,921,880	99.94 %	13.93%
		Penyandang Penyakit Sosial			
		Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial	120,864,500	63.96 %	18.89%

Tabel 4.5.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	419,309,617	96.99 %	43.23%
---	---	--	-------------	---------	--------

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan table 4.5, terdapat 2 kegiatan yang tidak teralisasi, dan terdapat 2 kegiatan dengan nilai efisiensi mendekati 100%, dan 24 kegiatan dengan nilai efisiensi lebih dari 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan efisiensi pada kegiatan di tahun 2020. Berikut perhitungan efisiensi kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2020.

Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi belanja	Realisasi pendapatan (%)	Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,475,000	100%	54.75%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284,500,574	83.74%	33.97%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	524,000,486	72.74%	72.03%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	153,694,060	95.99%	16.01%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29,601,000	87.35%	33.88%
		Penyediaan Alat Tulis Menulis	119,040,940	93.63%	12.71%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66,120,850	91.85%	7.19%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20,472,720	71.39%	28.67%

Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,240,000	35.06%	92.41%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	118,545,000	56.36%	21.03%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20,260,984	87.75%	23.08%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	29,860,000	99.95%	29.87%
		Pemeliharaan Rutun/Beskala Gedung kantor	4,144,200	2.02%	41.44%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kota Pekanbaru	-	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,828,000	100%	58.20%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2,887,950	100%	29.88%

Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,944,450	100%	29.44%
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	397,940,100	98.52 %	40.39%
		Peningkatan kemampuan (<i>capacity Building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	5,173,400	94.52 %	54.73%
		Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga Miskin	543,143,000	77.28 %	70.28%
		SLRT Pekanbaru	250,002,870	93.28 %	26.80%

Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan dan anak perempuan	-	-	-
		Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	36,186,000	66.20 %	54.66 %
		Pelatihan dan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	-	-	-
		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	222,225,140	76.12 %	29.19 %

Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	172,980,000	-	17.2%
		Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar Biasa	443,717,220	76.29 %	58.16%
		Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik bagi lanjut usia	-	-	-
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar	-	-	-

Tabel 4.6.
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Pendayagunaan Para penyandang cacat dan eks trauma	-	-	-
9	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Eks penyandang penyakit sosial	-	-	-
		Pemberdayaan Eks Penyandang penyakit sosial	-	-	-
10	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	179,152,200	80.42 %	22.27 %

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan table 4.6, terdapat 7 kegiatan yang tidak tereliasasi, dan terdapat 1 kegiatan dengan nilai efisiensi mendekati 100%, 25 kegiatan dengan nilai efisiensi dibawah 100% .

Elemen *value for money* ketiga adalah efektivitas, menurut Mahmudi cara mengukur tingkat efektivitas adalah :

Efektivitas : Realisasi Hasil (*outcome*) : Rencana Hasil (*output*) x 100%

Dimana *outcome* merupakan angka realisasi hasil/keluaran kegiatan dan *output* merupakan angka rencana hasil/keluaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Berikut merupakan perhitungan elemen efektivitas pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial kota Pekanbaru pada Tahun 2019.

Tabel 4.7.

Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1680 Lembar	1680 Lembar	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air Listrik	11 bulan	12 bulan	76.39%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	30 unit	30 unit	100 %
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%

Tabel 4.7.
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	65 unit	66.3%
		Penyediaan Alat Tulis Menulis	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	7 unit	7%

Tabel 4.7.
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 persen	100 persen	100%
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	100 %	100%	100%
		Peningkatan Manajemen Usaha bagi keluarga miskin	100%	100%	100%

Tabel 4.7.
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi, Perdagangan perempuan dan anak	-	15 Kasus	15%
		Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS	100 persen	100 persen	100%
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	300 orang	300 orang	100%
		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1 tahun	1 tahun	100%

Tabel 4.7.
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

		Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kesehtraan Sosial	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
		Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	115 KK	200 KK	57.5%
		Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana publik bagi lanjut usia	100 persen	100 persen	100%
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	24 orang	24 orang	100%

Tabel 4.7.
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2019 (Lanjutan)

8	Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
		Pemberdayaan Eks penyandang Penyakit Sosial	1 tahun	1 tahun	100%
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 orang TKSK 30 LKS 83 orang PSM KARANG TARUNA	12 orang TKSK 30 LKS 83 orang PSM KARANG TARUNA	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan table 4.7, terdapat 5 kegiatan dengan nilai efektivitas dibawah 100% dan terdapat 24 kegiatan dengan nilai efektivitas sebesar 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan efektivitas pada kegiatan di tahun 2020. Berikut perhitungan efektivitas kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2020.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1530 lembar	1530 lembar	100 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 bulan	12 bulan	91.67%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	30 unit	30 unit	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	58unit	58%
		Penyediaan Alat Tulis Menulis	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 unit	10 unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/beskala Gedung Kantor	8 unit	10 unit	8%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kota Pekanbaru	100 persen	100 persen	100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	100%	100%	100%
		Peningkatan Kemampuan (<i>capacity Building</i>) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya	100%	100%	100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

		Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	100%	100%	100%
		SLRT Kota Pekanbaru	100%	100%	100%
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	-	15 kasus	15%
		Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	100 persen	100 perse	100%
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	-	45 orang	45%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1 tahun	1 tahun	100%
	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		3 kegiatan	3%
	Penangan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	235 KK	250 KK	94%
	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana publik bagi lanjut usia	-	100 persen	100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2020 (Lanjutan)

7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Anak Terlantar	-	100 persen	100%
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	20 orang	20 orang	100%
9	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	-	2 kegiatan	2%
		Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	-	1 tahun	1%
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 orang TKSK 30 LKS 83 orang PSM KARANG TARUNA	12 orang TKSK 30 LKS 83 orang PSM KARANG TARUNA	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan table 4.8, terdapat terdapat 9 kegiatan dengan nilai efektivitas dibawah 100% dan terdapat 24 kegiatan dengan nilai efektivitas sebesar 100%.

4.3. Pembahasan Analisis *Value For Money* Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019 dan 2020

Terdapat kriteria-kriteria yang ditentukan untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan elemen *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

Menurut Mahsun (2006) dalam Dwinanda (2018), kriteria ekonomi adalah sebagai berikut : (1) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan ekonomis atau sangat ekonomis, (2) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan ekonomis berimbang atau cukup ekonomis, dan (3) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak ekonomis.

Menurut Mahsun (2010) dalam (Dwinanda, 2018) kriteria efisiensi adalah : (1) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak efisien, (2) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan efisiensi berimbang atau cukup efisien dan (3) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan berarti efisien atau sangat efisien.

Menurut Mahsun (2006) dalam (Dwinanda, 2018) kriteria efektivitas adalah ; (1) Jika nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak efektif, (2) jika nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan efektif berimbang atau cukup efektif, dan (3) jika nilai

perhitungan efektivitas lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan efektif atau sangat efektif.

Pada tahun 2019, terdapat 19 kegiatan dengan nilai perhitungan ekonomis di bawah 100. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 19 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Ini berarti bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berhemat pada 19 kegiatannya. Selain itu, terdapat 7 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan sebesar 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 7 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, dan terdapat 2 kegiatan yang tidak terrealisasi yaitu kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, berdasarkan hasil dari data yang diperoleh bahwa kegiatan ini tidak memiliki jumlah anggaran maupun realisasi anggaran.

Pada tahun 2020, 20 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan ekonomis kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, 20 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dana yang dikeluarkan kurang dari anggaran yang direncanakan pada tahun 2020. Ini berarti Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berhemat dana pada 20 kegiatan di tahun 2020. Selain itu, terdapat 4 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan sebesar 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 4 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Hal Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini sesuai dengan

anggaran yang direncanakan, dan terdapat 9 kegiatan yang tidak tereliasasi yaitu kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan kota pekanbaru, pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan, anak cacat, anak nakal kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial kegiatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik bagi lanjut usia, kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar, kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial dan kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial berdasarkan hasil dari data yang dipeoleh bahwa kegiatan ini tidak memiliki jumlah anggran maupun realiasi anggaran.

Pada tahun 2019, terdapat 2 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi mendekati 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, 2 kegiatan dinyatakan efisiensi berimbang. Ini menunjukkan bahwa presentasi sesuai dengan presentasi keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Terdapat 25 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dibawah 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 1 kegiatan ini dinyatakan tidak efisiensi berimbang.. Berdasarkan kriteria efisiensi, 1 kegiatan ini dinyatakan tidak efisiensi.

Hal ini menunjukkan bahwa presentase yang kurang dari presentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian, Terdapat 2 kegiatan yang tidak tereliasasi yaitu kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, berdasarkan hasil dari data yang diperoleh bahwa kegiatan ini tidak memiliki jumlah capaian kerja dan capaian anggaran.

Pada tahun 2020, terdapat 2 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi mendekati 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 2 kegiatan ini dinyatakan efisiensi berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa presentase 2 kegiatan ini sesuai dengan presentasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat 24 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 24 kegiatan ini dinyatakan tidak efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi fisik untuk kegiatan-kegiatan ini kurang dari presentasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 7 kegiatan yang tidak tereliasasi yaitu kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan dan anak perempuan, kegiatan pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, kegiatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik

bagi lanjut usia, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Eks penyandang penyakit sosial, dan kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial berdasarkan hasil dari data yang diperoleh bahwa kegiatan ini tidak memiliki jumlah capaian kerja dan capaian anggaran.

Pada tahun 2019, terdapat 24 kegiatan dengan nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 24 kegiatan ini dinyatakan efektif berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran dari kegiatan ini sesuai dengan ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan oleh objek. Terdapat 5 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 9 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran kegiatan-kegiatan ini tidak mencapai ekspektasi hasil /keluaran yang diinginkan oleh objek.

Pada tahun 2020, terdapat 24 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 24 kegiatan ini dinyatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran dari kegiatan ini lebih melebihi ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh objek. Terdapat 9 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 9 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran yang dilakukan tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diharapkan oleh objek.

Kegiatan Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Publik bagi Lanjut Usia dan Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin merupakan kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen *value for money* pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat satu kegiatan yang memenuhi elemen *value for money*, yaitu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan inilah yang memiliki pengelolaan organisasi yang paling baik diantara kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan Hipotesis yang diajukan sebelumnya, yang mana hipotesisnya adalah akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum memenuhi prinsip *value for money*. Meskipun hampir semua kegiatan pada tahun 2019 dan 2020 telah ekonomis dan efisiensi, namun tidak banyak kegiatan yang bersifat efektif dan memberikan dampak signifikan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Banyak kegiatan yang memiliki nilai efektivitas sama dengan 100% yang berarti dampak kegiatan tersebut tidak melebihi ekspektasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Ini berarti kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya menyesuaikan dengan target mereka tanpa berusaha untuk melewati target yang ditentukan.

Tabel 4.9
Pembahasan Kegiatan Ekonomis Pada Tahun 2019

No	Kegiatan	Persentase	Keterangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Ekonomis
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.04%	Ekonomis Berimbang
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	80.22%	Ekonomis Berimbang
4	Penyediaan jasa kebersihan	96.3%	Ekonomis Berimbang
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	87.8%	Ekonomis Berimbang
6	Penyediaan alat tulis menulis	93.58%	Ekonomis Berimbang
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	96.4%	Ekonomis Berimbang
8	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerang bangunan kantor	87.58%	Ekonomis Berimbang
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Ekonomis
9	Penyediaan makanan dan minuman	97.03%	Ekonomis Berimbang
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.43%	Ekonomis Berimbang
11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang –undangan	100%	Ekonomis
12	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Ekonomis
13	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99.38%	Ekonomis Berimbang

14	Program pemberdayaan fakir miskin, komuditas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	86.11%	Ekonomis Berimbang
15	Peningkatan usaha bagi keluarga miskin	49.89%	Ekonomis Berimbang
16	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	99.89%	Ekonomis Berimbang
17	Peatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	100%	Ekonomis
18	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	98.21%	Ekonomis Berimbang
19	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	98.07%	Ekonomis Berimbang
20	Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	47.62%	Ekonomis Berimbang
21	Peningkatan dan peayanan sarana dan prasarana publik bagi lanjut usia	34.37%	Ekonomis Berimbang
22	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	73.08%	Ekonomis Berimbang
23	Pendidikan dan pelatihan keterampilan eks penyandang penyakit sosial	100%	Ekonomis
24	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	63.96%	Ekonomis Berimbang
25	Peningkatan kualitas SDM	100%	Ekonomis

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	kesejahteraan sosial masyarakat		
--	---------------------------------	--	--

Tabel 4.10
Pembahasan Kegiatan Ekonomis Tahun 2020

No	Kegiatan	Persentase	Keterangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Ekonomis
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	83.76%	Ekonomis Berimbang
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dn perizinan kendaraan dinas operasional	72.74%	Ekonomis Berimbang
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	95.99%	Ekonomis Berimbang
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	87.5%	Ekonomis Berimbang
6	Penyediaan alat tulis menulis	93.63%	Ekonomis Berimbang
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	91.85%	Ekonomis Berimbang
8	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	71.90%	Ekonomis Berimbang
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.06%	Ekonomis Berimbang
10	Penyediaan makanan dan minuman	56.36%	Ekonomis Berimbang
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87.75%	Ekonomis Berimbang
	Pengadaan peralatan gedung kantor		

12	Pemeliharaan rutin/berskala gedung kantor	17.21%	Ekonomis Berimbang
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Ekonomis
14	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Ekonomis
15	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Ekonomis
16	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	99.82%	Ekonomis Berimbang
17	Peningkatan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	94.52%	Ekonomis Berimbang
18	Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin	78.58%	Ekonomis Berimbang
19	SLRT kota pekanbaru	93.46%	Ekonomis Berimbang
20	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	66.21%	Ekonomis Berimbang
21	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	76.12%	Ekonomis Berimbang
22	Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	76.29%	Ekonomis Berimbang
23	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	43.15%	Ekonomis Berimbang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.11
Pembahasan Kegiatan Efisiensi Tahun 2020

No	Kegiatan	Persentase	Keterangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	75.60%	Tidak Efisiensi
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.97%	Tidak Efisiensi
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.91%	Tidak Efisiensi
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.6%	Tidak Efisiensi
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.5%	Tidak Efisiensi
6	Penyediaan alat tulis menulis	3.84%	Tidak Efisiensi
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	17.48%	Tidak Efisiensi
8	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	12.54%	Tidak Efisiensi
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.47%	Tidak Efisiensi
10	Penyediaan makanan dan minuman	92.40%	Efisiensi Berimbang
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	27.89%	Tidak Efisiensi

	daerah		
12	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54.58%	Tidak Efisiensi
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	59.52%	Tidak Efisiensi
14	Penyusunan laporan keuangan semesteraan	28.97%	Tidak Efisiensi
15	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	28.98%	Tidak Efisiensi
16	Program pemberdayaan miskin, komoditas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	70.03%	Tidak Efisiensi
17	Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin	66.38%	Tidak Efisiensi
18	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	97.94%	Efisiensi Berimbang
19	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	31.64%	Tidak Efisiensi
20	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	30.35%	Tidak Efisiensi
21	Penyusunan kebijakan pelayanan dan	18.57%	Tidak Efisiensi

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		
22	Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	25.57%	Tidak Efisiensi
23	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	30.86%	Tidak Efisiensi
26	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks taruma	24.46%	Tidak Efisiensi
27	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	13.93%	Tidak Efisiensi
28	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	18.89%	Tidak Efisiensi
29	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	43.23%	Tidak Efisiensi

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.12
Pembahasan Kegiatan Efisiensi Tahun 2020

No	Kegiatan	Persentase	keterangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	54.74%	Tidak Efisiensi
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.97%	Tidak Efisiensi
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72.03%	Tidak Efisiensi
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.01%	Tidak Efisiensi
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.88%	Tidak Efisiensi
6	Penyediaan alat tulis menulis	12.71%	Tidak Efisiensi
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.19%	Tidak Efisiensi
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	92.40%	Efisiensi berimbang
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.67%	Tidak Efisiensi
10	Penyediaan makanan dan minuman	92.41%	Efisiensi berimbang
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.03%	Tidak Efisiensi

12	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.08%	Tidak Efisiensi
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.07%	Tidak Efisiensi
14	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan kota pekanbaru	41.44%	Tidak Efisiensi
15	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	58.20%	Tidak Efisiensi
16	Penyusunan laporan keuangan semesteran	29.87%	Tidak Efisiensi
17	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	29.44%	Tidak Efisiensi
18	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	40.39%	Tidak Efisiensi
19	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	54.73%	Tidak Efisiensi
20	Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin	70.28%	Tidak Efisiensi
21	SLRT pekanbaru	26.80%	Tidak Efisiensi
22	Pelaksanaan KIE konseling dan	54.66%	Tidak efisiensi

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	kampanye sosial bagi PMKS		
23	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	29.19%	Tidak Efisiensi
24	Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	17.2%	Tidak Efisiensi
25	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	58.16%	Tidak Efisiensi
26	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	22.27%	Tidak Efisiensi

Tabel 4.13
Pembahasan Perhitungan Efektivitas Tahun 2019

No	Kegiatan	Persentase	Keterangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Efektif Berimbang
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	76.39%	Tidak Efektif
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Efektif Berimbang
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Efektif Berimbang
5	Bimbingan teknis impementasi peraturan perundang-undangan	100%	Efektif Berimbang
6	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	Efektif Berimbang
7	Program pemberdayaan fakir miskin, komoditas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	100%	Efektif Berimbang
8	Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin	100%	Efektif Berimbang
9	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	15%	Tidak efektif

10	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	100%	Efektif Berimbang
11	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	100%	Efektif Berimbang
12	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	100%	Efektif Berimbang
13	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%	Efektif Berimbang
14	Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	57.5%	Tidak Efektif
15	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik bagi lanjut usia	100%	Efektif Berimbang
16	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks taruma	100%	Efektif Berimbang
17	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	100%	Efektif Berimbang
18	Pemberdayaan eks penyandang penyakit	100%	Efektif Berimbang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	sosial		
19	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	100%	Efektif Berimbang



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.14
Pembahasan Perhitungan Efektivitas Tahun 2020

No	Kegiatan	Persentase	Keterangan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Efektif Berimbang
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Efektif Berimbang
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Efektif Berimbang
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Efektif Berimbang
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	58%	Tidak Efektif
6	Penyediaan alat tulis menulis	100%	Efektif Berimbang
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Efektif Berimbang
8	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Efektif Berimbang
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Efektif Berimbang
10	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Efektif Berimbang
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Efektif Berimbang
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Efektif Berimbang
13	Pemeliharaan rutun/berskala gedung kantor	8%	Tidak Efektif
14	Bimbingan teknis impelemntasi peraturan perundang-undangan kota pekanbaru	100%	Efektif Berimbang
15	Penyusunan laporan	100%	Efektif

	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Berimbang
16	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Efektif Berimbang
17	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	Efektif Berimbang
18	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	100%	Efektif Berimbang
19	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	100%	Efektif Berimbang
20	Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin	100%	Efektif Berimbang
21	SLRT pekanbaru	100%	Efektif Berimbang
22	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	15%	Tidak Efektif
23	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	100%	Efektif Berimbang
24	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	45%	Tidak Efektif
25	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	Efektif Berimbang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	bagi PMKS		
26	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	3%	Tidak Efektif
27	Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	94%	Tidak Efektif
28	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana publik bagi lanjut usia	100%	Efektif Berimbang
29	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar	100%	Efektif Berimbang
30	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	100%	Efektif Berimbang
31	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	2%	Tidak Efektif
32	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	1%	Tidak Efektif
33	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	100%	Efektif Berimbang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pada tahun 2019, 77% dan tahun 2020 74% kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersifat ekonomis.
2. Pada tahun 2019, 34% dan tahun 2020 19% kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersifat efisien.
3. Pada tahun 2019, 94% dan tahun 2020 1,87% kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersifat efektif.
4. Pada tahun 2019 dan 2020, hanya terdapat 2 kegiatan dan 2 kegiatan yang memenuhi elemen *value for money*. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum memenuhi prinsip *value for money*

5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi dinas sosial kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan mengevaluasi kembali program kegiatannya agar dapat memenuhi elemen *value fo money* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari objek penelitian yang memiliki data yang lebih lengkap. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendalami lagi informasi dan masalah dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru



DAFTAR PUSTAKA

- Batian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta.
- Dwinanda, Y. (2018). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan*. Skripsi Yogyakarta: Uniersitas Samata Dharma.
- Erlangga Erlina, d. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto.dkk. (2007). *Akuntansi sektor publik edisi pertama*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonsia, k. P. (2016). *Kinerja Retrived November 23,2020, from Kamus Besar Bahasa Indonesia hhttps://kbbi.web.id/kinerja*.
- Krisyanti, M. (2012, September). *Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen Majalah Ilmiah Informatika*, 3 (3).
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UIIPRES.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moeharjo. (2014). *Pengukuran kinerja berbasis kompetisi* . Jakarta: PT.Granfindo Persada.
- Polii.I.R.A.dkk. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money*. Jurnal EMBA Vol.9 No. 4 Oktober 2020, Hal 71-78.
- Putri, N. (2020, February 24). *Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rahayu. (2020). *Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan alue for money pada distik navigasi kelas II banjarmasin tahun 2016-2019*. Banjarmasin: STIE INDONESIA.
- Rempowatu, J. T. (2016, Maret). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014*. Jurnal EMBA, 4 (1), 982-989.
- Renyowijoo. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba edidi tiga* . Jakarta: Mitra wacana media.
- Sanjaya, D. (2019). *Analisis Valu For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 8(120), 1-16.
- Sulisworo, D. (2009). *Pengukuran Kinerja*. D.I. Yogyakarta Indonesia: Universitas Ahhmad Dahlan.
- Trilaksono, B. &. (Analisis Value For Money dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik). 2020,10. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9 (4), 1-15.
- Triniyati. (2018). *Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan Pendekatan Value For Money periode Tahun 2015-2017*. Medan: Uniersitas Islam Negeri.